

Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov. Sumut Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Riska Syahputri Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate

Korespondensi penulis: riskaputri93073@gmail.com

Abstract. Ministerial Regulations are regulations set by the minister depending on how the regulations will be used to carry out certain government affairs. DPMPTSP has the task of assisting regional heads in carrying out government affairs in the field of investment and one-stop integrated services, in accordance with Chapter III Article 4 of the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 25 of 2021. This research aims to examine the implementation of employee performance in the Provincial DPMPTSP North Sumatra in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 25 of 2021 which focuses on Chapter III Article 4. Data collection is carried out using the observation method. The findings of this study emphasize the importance of performance quality.

Keywords: Performance, Regulation of the Minister of Home Affairs.

Abstrak. Permendagri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri tergantung pada bagaimana peraturan tersebut akan digunakan untuk menjalankan urusan pemerintah tertentu. DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai Bab III Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 25 Tahun 2021. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pelaksanaan kinerja pegawai pada DPMPTSP Prov. Sumut sesuai dengan Permendagri No 25 Tahun 2021 yang fokus pada Bab III Pasal 4. Perolehan data dilakukan dengan metode observasi. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya kualitas kinerja.

Kata kunci: Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri.

LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan cara penggunaannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Tanggung jawab DPMPTSP adalah mendukung pimpinan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai Permendagri No 25 Tahun 2021 yang fokus pada Bab III Pasal 4. Kinerja sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan karena menunjukkan apakah suatu perusahaan menuju ke arah yang benar atau tidak. Kinerja merupakan hasil akhir dari suatu prosedur yang dijelaskan dan dinilai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kuantitas dan kualitas tugas yang diselesaikan seorang pegawai sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya menjadi tolak ukur kerjanya dalam bekerja.

Kesimpulannya bahwa perusahaan harus berupaya meningkatkan standar kinerja karyawan karena gagasan bahwa kinerja adalah prosedur atau produk akhir yang dihasilkan oleh karyawan melalui berbagai kriteria yang harus dipenuhi dan memerlukan langkah-langkah untuk mencapainya.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Karyawan

Upaya, prestasi kerja, inisiatif, loyalitas, potensi kepemimpinan, produktivitas, prestasi kemahiran, dan semangat kerja adalah istilah-istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan kata "kinerja" dan memiliki arti yang sebanding. Meskipun istilah "kinerja" sering digunakan saat ini, namun belum ada makna yang diterima secara universal. Di beberapa perusahaan, penilaian individu adalah satu-satunya komponen kinerja.

Kinerja seorang pekerja ditentukan oleh kuantitas dan kaliber pekerjaan yang dihasilkannya selama mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan padanya. Berdasarkan kondisi atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, hasil kinerja suatu proses dibahas dan dinilai dalam jangka waktu tertentu. Kinerja adalah kuantitas atau kaliber pekerjaan yang diselesaikan oleh orang atau kelompok dalam suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama yang dilimpahkan atau digunakan dalam perusahaan berdasarkan norma, SOP, kriteria, dan metrik.

Evaluasi kinerja merupakan pendekatan formal untuk menilai seberapa sukses setiap karyawan melaksanakan tugasnya sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari tinjauan kinerja adalah untuk menginspirasi karyawan, menjelaskan tujuan pribadi, memberikan kritik yang bermanfaat, dan meletakkan dasar bagi rencana pengembangan yang efektif. Metrik kinerja karyawan, potensi, dan kebutuhan pertumbuhan didokumentasikan dalam tinjauan kinerja rutin. Selama penilaian, dimungkinkan untuk memeriksa secara menyeluruh isi, beban, dan jumlah pekerjaan, meninjau apa yang telah dicapai selama periode pelaporan, dan mencapai kesepakatan mengenai tujuan masa depan. Evaluasi kinerja hanyalah sekedar rapor yang diberikan kepada bawahan oleh atasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa evaluasi kinerja adalah suatu metode untuk menentukan seberapa baik karyawan telah melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan muatannya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu. Tentang Pelayanan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Permendagri Republik Indonesia No 25 Tahun 2021. Mengingat DPMPTSP Provinsi bidang usaha di wilayah Kabupaten/Kota bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha di wilayah provinsi dan dalam rangka melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan Pasal 7 dan 38 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah” perlu menetapkan Permendagri tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan Permendagri No 25 Tahun 2021, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dan fokus pada analisis kinerja pegawai pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara. Tujuan metode analisis deskriptif melakukan penelitian melalui uraian suatu peristiwa secara metodis, faktual, dan benar. Metode observasi berdasarkan sumber data sekunder dan pengamatan secara langsung digunakan untuk memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendagri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri tergantung pada bagaimana peraturan tersebut akan digunakan untuk menjalankan urusan pemerintah tertentu. Kinerja Karyawan Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Dari Permendagri No 25 Tahun 2021 pada Bab III Pasal 4 menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang DPMPTSP :

BAB III Pasal 4

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.”

Peraturan Menteri ini merupakan kerangka pembentukan DPMPTSP dan tidak dimaksudkan untuk digabungkan atau dikelompokkan dengan urusan pemerintahan lain yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. DPMPTSP adalah organisasi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi yang bertugas mengatur kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal. Setiap organisasi menetapkan peran, tanggung jawab, dan tingkat wewenang setiap individu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tanggung jawab di tempat kerja dilandaskan pada prinsip pemisahan peran. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, mempunyai struktur. Organisasi adalah suatu sistem yang tersusun dari pola-pola kegiatan kerja sama yang dilakukan secara teratur dan konsisten oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan. DPMPTSP mempunyai

tugas melaksanakan tugas yang berkaitan dengan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi, dan membantu provinsi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan perizinan dan pembangunan terpadu, iklim, promosi, pelayanan, dan pelaksanaan. kontrol. melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan tugas dan kewajiban gubernur.

Kinerja DPMPTSP bisa dilihat dari Visi dan Misinya berdasarkan pelaksanaan tugas yang diberikan kepala daerah adapun Visi dari DPMPTSP ialah “Sumatera Utara yang maju, aman, dan mermartabat”. Dan tujuan dari Misinya membangun masyarakat di Sumatera Utara yang dipengaruhi oleh Iman dan Taqwa, tersedianya pangan dan sandang yang cukup, rumah yang nyaman, kesehatan yang prima, cara hidup yang menyenangkan, dan biaya yang terjangkau. Pembangunan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki prospek politik yang menjanjikan memerlukan kehadiran pemerintahan yang bermoral tinggi dan disukai banyak orang, pembuatan kebijakan yang baik, politik yang adil dan beretika, serta masyarakat yang memiliki kesadaran yang jelas akan posisinya di negara yang lebih luas. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang berpendidikan, berwawasan luas, cerdas, berdaya saing, kooperatif, dan mandiri serta berkesinambungan dalam bidang pendidikan. membangun lingkungan sosial yang menyenangkan tanpa prostitusi, penyelundupan, perjudian, dan kejahatan lainnya di Sumatera Utara agar dapat menjadi contoh bagi seluruh Asia Tenggara dan dunia. Karena ekologi yang terpelihara dengan baik, lingkungannya yang bersih, dan penduduknya yang menyenangkan, terpelajar, beradab, dan berperikemanusiaan, Sumatera Utara tidak rentan terhadap perkembangan masyarakat yang buruk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memastikan bahwa DPMPTSP yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. dan melakukan lebih banyak reformasi, lebih memperhatikan kualitas kinerja demi mengedepankan performa optimal dan kenyamanan dalam bekerja. Karena kinerja sangat penting untuk keberhasilan bisnis dan menunjukkan apakah suatu perusahaan menuju ke arah yang benar.

DAFTAR REFERENSI

Amalia Yunia Rahmawati. (2023). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*. July, 1–23.

- Bowo Pranogyo, A., Hamidah, & Suyatno, T. (2022). *Kinerja Karyawan*. CV PENIKS MUDA SEJAHTERA.
- Daulay, R., Kurnia, E., & Maulana, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah di Kota Medan. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 209–218. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3612>
- Dwi Aprianto, M. A. (2018). *Manajemen Kinerja*. Guepedia.
- Fauzi, A., & Hidayat Na, R. (2020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press.
- Fitriah, Rahayu, I., & Herman, M. (2021). Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal. *E-Print UNISKA*, 0(0), 1–8.
- Hakim, M. (2019). Analisis Kinerja Karyawan Studi Kasus Pt. Reycom Dokumen Solusi. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i1.953>
- Hery. (2021). *Manajemen Kinerja*. PT Grasindo.
- Hidayat, F. (2018). Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi). In *Tesis*.
- Latief, A., Rosalina, D., & Apiska, D. (2019). Analisis Hubungan Antar Manusia terhadap Kinerja Karyawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(3), 127–131. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i3.34>
- Marsithah, L. (2022). *Model Kinerja Dosen Berbasis Kearifan Lokal*. Umsu Press.
- Novie, D., Arta, C., Leuhery, F., Abubakar, H., Yusuf, M., Cakranegara, P. A., Jayapura, P. P., Pattimura, U., Bosowa, U., Bandung, S., & Presiden, U. (2023). Literature Review: Analysis of the Relationship Between Training and Employee Performance in a Company Literature Review: Analisis Hubungan Antara Pelatihan dan Kinerja Karyawan di Sebuah Perusahaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(1), 162–168. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Nurdin, N., & Djuhartono, T. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 137–148. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.328>
- Parwati, M. (2021). *Analisis Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*. 1–23.
- Pinrang, K. (2019). *Alumni program studi pendidikan administrasi perkantoran FIS UNM Dosen program studi pendidikan administrasi perkantoran FIS UNM*.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, & Chaerunnisah, R. (2020). Kinerja Karyawan. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*.
- Sudiro, A. (2019). *Penilaian Kinerja*. UB Press.
- Yuniarti, R., Irwansyah, R., Hasyim, M. A. N., Riswandi, P., Septania, S., Rochmi, A., Febrianty, Wijaya, I. G. B., Handayani, F. S., Bambang, Setiorini, A., Bahrin, M. F. & K., Kairupan, D. J. I., Ekowati, S., Nurhikmah, Suryani, N. K., & Negara., I. S. K. (2021). Konsep Kinerja Karyawan. In *Kinerja Karyawan*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/344742-kinerja-karyawan-tinjauan-teori-dan-prak-7d18f7a9.pdf>